

## **PENGARUH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KAMPUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG**

**Berti Pakaila**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victori Sorong  
email : bertipakaila@unvicsorong.ac.id

***Abstract:** Development of road infrastructure in Sorong Regency is an effort of the government of Sorong Regency in increasing community income. This can be seen in the increasing flow of transportation that carries a variety of potential agricultural resources produced by rural communities that will be distributed in various markets in several districts in Sorong Regency, besides that road facilities also open isolated areas, especially for the community, who live in the interior, so they can enjoy the facilities and infrastructure of roads between villages and can increase income by distributing agricultural products produced by the community. Road Infrastructure Development also provides added value for the government of Sorong Regency, which is able to distribute various community needs.*

***Keywords:** development, road infrastructure and distribution of goods*

## **PENDAHULUAN**

Program Pengembangan strategi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan program penjabaran dari uu Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Propinsi Papua Barat. Pembangunan infrastruktur jalan untuk dapat membantu masyarakat didalam meningkatkan pembangunan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerinth Daerah, Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang tinggi melalui membangun infrastruktur. Hal ini termasuk infraktur jalan yang ada di kampung.

Adapun jaringan jalan kampung sudah terbangun sepanjang 250 kilometer di 216 kampung. Dengan adanya kesenjangan infrastruktur antara kampung dan kota, maka pemerintah menegaskan pentingnya infrastruktur jalan antara kampung dan kota, maka pemerintah menegaskan pentingnya infrastruktur jalan di kampung dan wilayah pinggiran di kabupaten Sorong demi pembangunan ekonomi yang merata. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di kampung. Perhatian yang besar terhadap kampung itu didasarkan pada kenyataan bahwa kampung merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat di Kabupaten Sorong. Kedudukan kampung merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan infrastruktur jalan kampung selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat kampung dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan kampung melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan yang akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan usaha usaha mikro dan akan meningkatkan pendapatan, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan infrastruktur jalan kampung bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sector dan aspek luar kampung sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun potensi sumber daya bagi pembangunan di Kabupaten Sorong

Dalam teori pembangunan infrastruktur kampung yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik kampung yang akan membantu masyarakat di dalam memasarkan hasil pertanian yang umumnya dimiliki oleh masyarakat kampung ke pasar pasar tradisional yang ada di beberapa Distrik yang ada di Kabupaten sorong. Pembangunan Infrastruktur jalan merupakan program Pemerintahan Kabupaten Sorong dalam meningkatkan sarana transportasi darat yaitu dengan menghubungkan beberapa kampung yang ada pada beberapa Distrik di Kabupaten Sorong guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Sorong yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan kampung akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat kampung. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang,

terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut.

Jalan merupakan akses untuk transportasi darat, jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan social di daerah, keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur jalan kampung, melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan sampe dengan tahap operasi dan pemeriharaan). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) Kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) Kerberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, (3) Kemampuan masyarakat dalam membangun suatu komitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitas kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Pembangunan infrastruktur jalan pada kampung terus dilakukan, yang dimulai dari Distrik Klawak ke ke Distrik Aimas di Kabupaten Sorong dengan jarak tempuh kurang lebih 150 Km yang melalui 60 kampung kondisi ini telah melancarkan seluruh mobilitas masyarakat yang mempunyai potensi sumber daya pertanian yang akan di jual dari beberapa kampung ke pusat pasar yang ada di beberapa Distrik yang ada di Kabupaten Sorong Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah kampung, karena infrastruktur merupakan penentuan utama keberhasilan kegiatan pembangunan, dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan lapangan kerja sector konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sector-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat di anggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas.

Fenomena yang terjadi adalah masih banyaknya kendala dalam pembebasan tanah adat oleh pemilik hak ulayat , keterbatasan dana pembangunan jalan masih banyaknya jalan yang masih rawa dan banyaknya sungai yang melintasi jalan- jalan yang akan dibangun kondisi sosial masyarakat pedalam yang belum mengerti adanya perpanjangan jalan serta perluasan jalan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini akan terbentuknya pembuatan jalan utama, pembuatan saluran-saluran air dan cabang-cabang jalan sebagai pematokan lahan. Demikian juga dengan biaya transportasi, biaya kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dimana sebelum terbangunnya jalan semua harga barang menjadi naik karena mengingat biaya transportasi dan jarak jalan yang di

tempuh memakan waktu yang cukup lama, konsis ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi dan social salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan Kampung**

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintah. Sementara menurut Saparin (1997 : 46) dalam bukunya “ Tata pemerintahan dan administrasi desa” , menyatakan bahwa: “pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pemimpin seorang kepala desa peserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar mapun kedalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perkonomian desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagian peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah desa mempunyai pengertian sendiri menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3) bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Solekhan (2014 : 16) bahwa “pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik” . penerapan UU No.32/2014, kemudian diterbitkan lagi tentang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintahan supradesa, juga membawa perubahan dalam reaksi kekuasaan antar kekuatan polotik dilevel desa.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarkat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, pasal 2 ayat (20) pengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia, dapat menimbulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebagai organ atau alat yang

memproses berlangsungnya pelayanan dan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat.

### **Pengertian dan Tujuan Pembangunan**

Di era modernisasi saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori sering dengan perkembangan jaman. Menurut Todaro (2000:18), menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur social, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasioanal, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap, yaitu : (1) pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya. (2) menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagian dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan”.

Menurut Moch Solekhan (2014:70) mengatakan bahwa “pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpauan pembangunan antaran desa dalam satu Kabupaten/Kota, yang meliputi : (1) Penggunaan dan manfaat wilayah desa rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. (2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (4) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”.

### **Pengertian Infrastruktur**

Canning dan pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “infrastruktur memiliki sifat ekstenalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eskternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan ekstarnalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Menurut Mankiw (2003:38) Infratraktur merupakan “wujud dari public capital (modal public) yang dibentuk dari inverstasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan system pembuangan” .Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003:32), bahwa “system infrastruktur dapat didefinisikan

sebagai fasilitas-fasilitas atau struktu-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dinutuhkan untuk berfungsinya system social dan sistem ekonomi masyarakat”.

### **Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Menurut Adji Adisasmita (2011 : 79), mengatakan bahwa “jalan merupakan prasaranan transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air” .Menurut Rinaldi Mirsa (2011 : 54), mengatakan bahwa “ dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) menjeskan bahwa jalan merupakan prasaranan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tahan, di atas permukaan tahan, di bawah permukaan tahan dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik, pertahan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; jalan sebagai prasaranan distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang merupakan satu kesatuan system jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program utama pemerintahan kampung sebagai struktur dasar dalam penataan elemen lingkungan. Dengan adanya sarana traspostasi darat, maka pertumnuhan ekonomi meningkat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan masyarakat desa berjalan dengan lancer dan cepat.

Investasi pada prasarana pembangunan infrastruktur jalan menjadi satu pilihan yang di sukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukan besarnya peran pemerintah dalam mengadakan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan infestasi bagi Bergeraknya roda peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dan komposisi pembangunan infrastruktur jalan akan terus mengalami perubahan seiring degang berlangsungnya demografi. Pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat di butuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi yang telah dihadapi Indonesia saat ini.

Jalan memberikan peran yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, sehingga akan diperoleh peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **Kesejahteraan Masyarakat Kampung**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk social, baik kita suku ataupun tidak, hamper semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berhubungan serta berkaitan dengan orang lain yang ada disekitar kita, kondisi sejahtera biasanya menunjukan pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhnya kebutuhan material dan non-material. Dalam membahas kesejahteraan, tenting harus di ketahui tentang pengertian kesejahteraan.

Menurut W.J.S Poerwadarimta (2006:121) sejahteraan adalah “aman, sentosa, dan makmur” .sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sector kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagaian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, kelantaran, ketidak berfungsi fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.

Menurut Midgley (2005:21) mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat di atur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat di penuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat di peroleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti sebagai berikut:

- (1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- (2) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknika (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- 3) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan menunjukan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuahn masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.
- (4) Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan financial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkucukupan.

Menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesucian dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dilanjutkan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

### **Penelitian Terlebih Dahulu**

Herranz-Loncen (2008:69) melakukan penelitian mengenai peran infrastruktur terhadap pertumbuhan dengan hasil penelitian menunjukan bahwa infrastruktur dengan skop lokal, yaitu transportasi kota, distribusi listrik, dan infrastruktur air memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol. Ketersediaan listrik secara nyata tidak hanya diperlukan oleh pembangkit listrik untuk operasionalnya namun juga digunakan sebagai input dalam proses produksi, terutama kebutuhan yang besar atas listrik oleh perusahaan-perusahaan manufaktur (Wang, 2004 : 75).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fang dan Zhang (2004 : 74), keduanya ingin melihat pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas di sector pertanian dan non pertanian di kawasan pedesaan di setiap provinsi di Cina. Kemudian membedakan kawasan rural (pedesaan) di Cina antara kawasan Barat Cina, Tengah Cina, dan Timur Cina. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa secara statistik, capital public dan modal manusia (pendidikan) secara signifikan mempengaruhi produktivitas di sektor non pertanian ; hal ini disebabkan oleh sektor non pertanian memberikan kontribusi besar pada pendapat pedesaan. Penelitian ini juga membuktikan pentingnya capital publik, dimana produktivitas kawasan barat lebih tinggi dari pada kawasan lainnya. Hal ini



disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di barat daripada di dua kawasan lainnya (Fan dan Zhang, 2009:7).

## **METODE**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan sumber data sekunder. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Penelitian kualitatif mengutamakan makna yang di ungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa dari data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian. Penelitian berusaha menggali, mengidentifikasi, menjelaskan, meringkas berbagai kondisi yang berhubungan dengan variabel yang teliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data dihimpun menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Untuk pengumpulan data di lakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan :

1. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu teknik penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca buku-buku literature yang ada hubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan meninjauan (observasi) langsung, melakukan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis data model interaktif, yakni dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Sesuai dengan peraturan pemerintah 34 Tahun 2006 tentang jalan bahwa wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum, yang meliputi penyusunan secara teknis, memberikan sosialisasi dan kewajiban dalam penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan, sesuai perencanaan dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang termuat dalam

program yaitu dimulai dari menggalian gagasan pada tingkat musyawarah di kampung kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat kampung tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut, kemudian diikutsertakan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan. Bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam tahap perencanaan adalah kehadiran dalam rapat serta keaktifan dalam memberi saran atau usulan.

Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah kampung masih belum mencaapi target, dikarenakan kurang adanya kerjasama dan menjalin informasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, partisipasi masyarakat pun berpengaruh dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pemerintah kampung diharapkan memberi respon pada setiap apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, sumber daya yang cukup baik dapat menunjang suatu peningkatan hidup bagi masyarakat.

Dengan demikian, pada standar operasional Prosedur pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah Kabupaten Sorong yang peruntukan oleh masyarakat memberi dampak bagi perkembangan ekonomi di kampung yang sudah baik bagi masyarakat, karena adanya pembangunan jalan memberi kemudahan bagi masyarakat hendak menjual hasil kebun ke tempat lain maupun masyarakat kampung yang berpergian atau keluar masuk menggunakan akses jalan dengan jarak tempuh yang jauh sudah memberi kemudahan yang dinikmati.

Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang jalan (Anonymous, 2006) menyatakan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan secara umum. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembangunan jalan sudah berjalan dengan baik, walaupun dalam pengerjaan infrastruktur jalan sebagaimana yang diharapkan.

Maka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan diperlukan partisipasi masyarakat secara swadaya, karena partisipasi masyarakat adalah sebuah strategi untuk mendapatkan dukungan, dan partisipasi adalah suatu kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Sehingga belum sepenuhnya harapan masyarakat dapat direspon oleh pemerintah dan belum mencapai target secara maksimal. Indikasinya kondisi struktur jalan masih banyak yang perlu dibangun dan diperbaiki mengingat bahwa, perekonomian dapat di pandang baik jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan masyarakat dapat dijalankan dengan efisien dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur jalan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam menopang

aktivitas transaksi jual beli hasil perkebunan bahkan hasil alam lainnya yang ada di Kabupaten Sorong.

### **Pelaksanaan Infrastruktur Jalan Terhadap Ekonomi Masyarakat**

Infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan mampu menaikkan pertumbuhan usaha ekonom rakyat sekitar. Infrastruktur jalan berguna untuk memudahkan mobilitas factor produksi, terutama penduduk; memperancar mobilitas barang atau jasa; dan mempercayakan perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya suatu pembangunan jalan menjadi suatu kebutuhan yang artinya juga sebagai alat pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah, dengan adanya perubahan yang nyata maka secara langsung memberikan manfaat dan kemudahan-kemudahan.

Kendala sering muncul terkadang dari adanya kurang kesadaran akan apa yang di kerjakan, tidak ada tindakan langsung dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga akan muncul segala kendala-kendala yang ada dan pelaksanaan pembangunan akan terhambat. Harusnya segala kendala yang akan terjadi dalam suatu pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan harus bisa di atasi oleh pemerintah kampung setempat sehingga tidak terjadinya pembangunan yang tidak terlaksana.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sebagai pemicu utama tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan berdampak pada sumber penerimaan masyarakat yang bervariasi. Pembangunan jalan telah mendorong perkembangannya usaha seperti usaha industri kecil, dan jasa angkutan, material bahan bangunan. Dampak yang terjadi ini sebagai akibat akses jalan yang mudah dan murah mendorong masyarakat melakukan usaha-usaha ekonomi dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prasarana jalan pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik secara aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun ketahanan dan keamanan. Sarana jalan juga sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/peningkatan pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi dimasyarakat berbeda.

Memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tersebar secara tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya sarana jalan yang berperan sebagai pendorong pengembangan dan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka perlu pembangunan dan pemeliharaan prasarana. Secara umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sorong adalah letak geografik yang sulit dijangkau sarana dan prasarana transportasi

yang kurang memadai, sumber daya manusia rendah, dan pelepasan lahan dari masyarakat yang begitu sulit, serta keterlambatan keuangan dari pemerintah daerah

Infrastruktur memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat karena jika infrastruktur terus diperbaiki maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami kenaikan dan semakin membaik atau terpenuhi. Karena pada hakekatnya pembangunan infrastruktur ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalkan melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja. Infrastruktur merupakan tempat yang menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, infrastruktur jalan menetralkan harga barang dan jasa antar daerah.

Manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat dengan adanya pembangunan jalan sangat banyak, diantaranya berupa kenaikan harga atau nilai tanah, dan mudahnya akses jalan. Dengan demikian infrastruktur jalan yang bagus dan baik maka akan meningkatkan dan mempercepat arus barang dan jasa yang tentu mempunyai akibat besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat secara cepat dan akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten sorong.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesempatan kerja secara langsung memiliki pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan seperti kualitas dari jalan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pada kabupaten sorong.

### **Implementasi Kebijakan dan Realisasi**

Implementasi antara tujuan dan realisasi yakni membangun kekompakan dan kerja sama yang memungkinkan untuk kelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan direalisasikan melalui aktivitas pemerintah kampung yang melibatkan berbagai kepentingan. Kebijakan infrastruktur dapat pula dijadikan strategi oleh pemerintah kampung.

Pembangunan di kampung menjadi penting karena kampung sendiri memiliki berbagai masalah dan kebijakan dari pemerintah kampung terkait dengan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan serta lingkungan yang memadai. Kampung tersebut memiliki kekayaan berupa sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, maka potensi kekayaan yang ada perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga harapan masyarakat sesuai dengan implikasi, realisasi, dan tujuan dapat memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau pun pemerintah kampung. Tak dapat dipungkiri yang menjadi harapan dan tujuan masyarakat sendiri adalah meningkatkan kualitas hidupnya dengan terlepas dari masalah tersebut agar dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dengan kondisi kampung sekarang dengan yang lebih maju.

Kesehatan, ekonomi, pendidikan bahkan lingkungan yang memadai merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Selain itu juga terdapat kebutuhan pelengkap, dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya membutuhkan sarana prasarana yang dapat memunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan membangun infrastruktur lainnya, sesuai dengan tujuan yakni untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai langkah menanggulangi angka kemiskinan yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan kemudian disesuaikan dengan focus penelitian dari perumusah masalah, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada diantara kampung belum terealisasi secara keseluruhan dengan baik yang dimana seluruh infrastruktur yang ada telah dilanggarkan untuk pembangunan kedepan sudah sebagaian atau berkisar 80% terealisasi dari dana yang ada yang diberikan kepada kepala kampung. Sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi infrastruktur maupun dana tahapan selanjutnya untuk pembangunan yang ada di kampung tersebut.
2. Pembangunan infrastruktur jalan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dimana pembangunan infrastruktur jalan dikampung tersebut sampai saat ini belum merasakan kesejahteraan karena pembangunan yang ada tersebut belum terealisasi dengan baik.
3. Kendala dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dialami dan samapai sekarang ini mengalami kendala dari dana yang belum diberikan atau keterlambatan pencarian dana, yaitu: (a) pelepasan lahan dari masyarakat, dikarenakan kurangnya respond an partisipasi dari masyarakat dalam membantu pemerintah kampung untuk meningkatkan pembangunan yang ada tersebut. (b) keterlambatan keuangan dari pemerintah daerah untuk proses percepatan pembangunan yang ada dikampung.

## **SARAN**

1. Diharapkan keikutsertan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses peksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

2. Perlu adanya evaluasi terkait dengan penggunaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan khususnya, antara masyarakat dengan pemerintah kampung. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh kampung, sehingga anggaran yang dilakukan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar kampung. Diharapkan melaksanakan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dalam memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 Pengantar Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kelengkapan Kebijakan Negara Jakarta : Bumi Aksara
- Abidin, Said, Zainal. 2004. Kebijakan public. Jakarta : Yayasan Pancur
- Siwah. Adisasmita, Rahardjo, 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semester, Uhaindo Media dan Offset. Arikunto,
- Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Bintarto, R. 1984. Geografi Desa. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM. Budiman,
- Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia pustaka Umum.
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pedesaan. Jakarta : Catatan Ke 1 PT. Pustaka Lidensindo.
- Adisasmita, Sakti Adji. Perencanaan Pembangunan Transportasi. Yogyakarta : PT Graha Ilmu, 2011
- Arikunto, S. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Caning David and Peter Pedroni. "infrastructure and Long Run Economic Growth" .England : University of Belfast, 2004.
- Daldjoeni, N. Geografi Kota dan Desa. Bandung : PT Alumnus, 2003
- Hadari, Nawawi. "Metode Penelitian Bidang Sosial" . Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2005. Inu Kencana, "Pengantar Ilmu Pemerintahan" . cetakan ketiga. Jakarta : Refika Aditama, 2005.
- Kodoatie, R.J. "Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur" . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

- N. Gregory, David Romer, David N Weil., "A Contribution To The Emprics of economic Growth, "the quarterly journal of economics, Vol 107, No. 2, Mey 1992. Ndraha, Taliziduhu. "Pembangunan Masyarakat" . Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Jakarta.
- Kybernologi (ilmu pemerintahan baru), Jakarta : Rineka Cipta, 2011. Poerwadarimta, W.J.S., "Pengertian Kesejahteraan Manusia" . Bandung : Mizan, 1996.
- Rinaldi Mirsa, "Elemen Tata Ruang Kota" . Lhokseumawe : Graha Ilmu, 2011. Saparin. Tata, "Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa" . Jakarta : Ghailia Indonesia, 1997.
- Solekhan. Moch, "pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa" . Malang : Wisma Kalimetro, 2014.
- Soekanto. 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta : Pt. Raja Garfindo Persada.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta, 2003. "Memahami Penelitian Kuantitatif . Bandung : Alfabeta 2005.
- \_\_\_\_\_, Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif" dan R & D" . Bandung : Alfabeta. 2011.
- Suradinata, Ermaya, "Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia, Bandung : pustaka Ramadhan, 2011.
- Suryono, "Teori dan Isu Pembangunan." Universitas Malang Press, Malang, 2001.
- Suud. Mohammad, 3 orientasi kesejahteraan social. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006.